



ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT

Putu Dewi Cahyani¹ Made Heny Urmila Dewi²

Article history:

Submitted: 04 Agustus 2022

Revised: 18 Agustus 2022

Accepted: 2 September 2022

Keywords:

CBT;

Government Role;

Public Welfare;

Social Capital;

Society Participation;

Abstract

The purpose of this study is to find (1) the influence of the role of government, social capital on community participation in the Mandalika special economic zone, (2) the influence of the role of government, social capital and community participation on the welfare of the community in the Mandalika special economic zone (3) community participation mediate the role of government and social capital on the welfare of the people in the Mandalika special economic zone. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, in-depth interviews. Data were collected using a Likert scale, then analyzed using SEM-PLS. This study is a study using a sample of 300 respondents. This research is an associative research that uses primary and secondary data. The results showed that the role of government and social capital had a positive and significant effect on community participation, then the community participation variable had a positive and significant effect on community welfare and community participation variables mediated the role of government and social capital on community welfare in the Mandalika special economic zone in Central Lombok Regency. West Nusa Tenggara.

Kata Kunci:

CBT;

Kesejahteraan Masyarakat;

Modal Sosial;

Partisipasi Masyarakat;

Peran Pemerintah;

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan (1) pengaruh peran pemerintah, modal sosial terhadap partisipasi masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika, (2) pengaruh peran pemerintah, modal sosial dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika (3) partisipasi masyarakat memediasi peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, wawancara mendalam. Data yang dikumpulkan menggunakan skala likert, kemudian dianalisis menggunakan SEM-PLS. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan sampel sebanyak 300 responden. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat, selanjutnya variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan variabel partisipasi masyarakat memediasi peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Udayana, Bali,

Indonesia

Email:

dewi.cahyanii10@gmail.com

PENDAHULUAN

Daerah Nusa Tenggara Barat sampai saat ini mendapatkan beberapa penghargaan sebagai salah satu pulau terbaik yang dimana Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah dengan julukan sebagai “Pulau Seribu Masjid” yang tentunya memiliki daya pikat tersendiri untuk menarik wisatawan yang ingin datang berkunjung. Melihat potensi yang dimiliki, pengembangan pariwisata menjadi salah satu program dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata yang sudah direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

Kawasan ekonomi khusus yang dibangun salah satunya yang berada di Nusa Tenggara Barat yaitu kawasan ekonomi khusus Mandalika. Konsep bisnis yang telah dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dibagi menjadi dua, yakni *public realm* dan *private realm*. Kawasan ekonomi khusus Mandalika sendiri merupakan pariwisata yang berkaitan dengan masyarakat langsung melalui *multiplier effect* yang dimiliki pariwisata itu sendiri. Namun *institutional setting* tersebut mampu menjangkau semua *multiplier effect* dari pariwisata yang tersedia sehingga akan mencakup dan dapat juga mengoptimalkan potensi yang tersedia di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran dalam aspek spasial melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mengatur aspek spasial seperti yang tercantum dalam peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Dampak dari terjadinya wabah covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata terutama pada sektor pariwisata yang terdapat di Nusa Tenggara Barat yang mengalami penurunan jumlah kedatangan wisatawan yang dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.

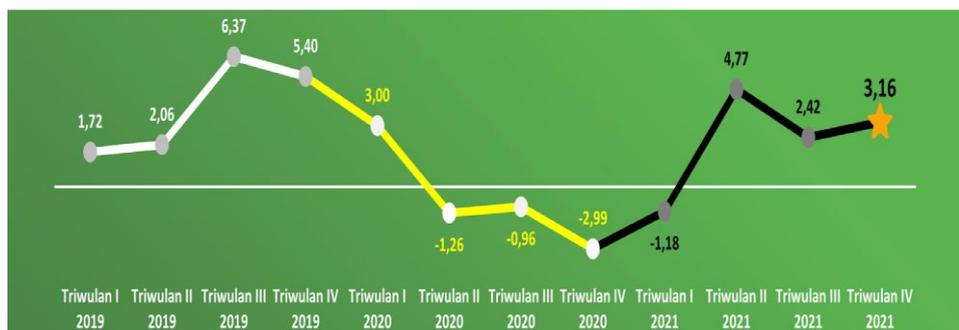
Tabel 1.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Nusa Tenggara Barat
(Dalam ribuan orang)

Bulan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	57.298	78.209	89.234	50.877	15.120
Pebruari	64.278	99.267	101.756	56.451	12.294
Maret	61.419	97.277	97.902	62.446	9.413
April	100.940	164.599	181.329	103.557	70
Mei	107.957	164.571	192.006	124.903	145
Juni	130.446	209.065	199.177	155.387	138
Juli	271.197	280.743	206.813	181.002	302
Agustus	153.335	269.330	1.412	196.508	459
September	192.150	244.900	33.443	122.668	244
Oktober	90.494	220.300	25.120	132.891	610
Nopember	83.866	209.907	25.110	153.663	448
Desember	90.948	197.337	51.254	210.438	739
J u m l a h :	1.404.328	2.078.654	1.204.556	1.550.791	39.928

Sumber: Statistik Dispar Prov NTB, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 48% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tahun 2018

mengalami penurunan drastis sebesar 42% karena mengalami bencana alam gempa bumi sehingga mengalami penurunan yang cukup drastis, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 28% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang sangat drastis sebesar 97% dikarenakan adanya pandemi.



Sumber: BPS Prov NTB, 2021

Grafik 1.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Triwulan IV-2021

Jika dilihat dari grafik 1. pada triwulan IV 2019 memiliki presentasi 5,40% dan pada triwulan IV tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang mencapai angka -2,99%. Jika dilihat dari grafik yang ada maka pandemic covid 19 ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang ada. Pengangguran merupakan faktor kemiskinan yang terjadi dimasyarakat, dikarenakan sangat kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2 adanya Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2018-2020.

Tabel 2.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2018	2019	2020
Kabupaten Lombok Barat	3,22	3,52	4,58
Kabupaten Lombok Tengah	2,98	2,35	3,74
Kabupaten Lombok Timur	3,02	3,35	4,17
Kabupaten Sumbawa	3,29	2,99	4,01
Kabupaten Dompu	3,18	3,04	3,28
Kabupaten Bima	4,63	2,79	2,89
Kabupaten Sumbawa Barat	3,53	5,29	5,50
Kabupaten Lombok Utara	-	1,99	3,01
Kota Mataram	6,49	5,28	6,83
Kota Bima	2,27	4,06	4,42
Nusa Tenggara Barat	3,58	3,28	4,22

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam persen (2021)

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan usaha dengan berbagai cara untuk mengentaskan angka kemiskinan. Namun, penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun masih terbilang minim.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016- 2020

Kemiskinan	Kemiskinan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	145,37	142,14	130,00	128,82	128,10
Persentase Penduduk Miskin	15,80	15,31	13,87	13,63	13,44
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,74	2,81	2,31	2,33	1,42
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,64	0,75	0,54	0,25	0,26

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah dalam angka, Tahun 2021

Tabel 3 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 terjadinya penurunan dibandingkan pada tahun 2018, angka tersebut dikatakan masih menduduki posisi diatas angka nasional. Dalam periode 2019, jumlah penduduk miskin berkurang sangat minim sebesar 128.820 ribu orang dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 128,10 ribuan orang dikarenakan sinkronisasi program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sampai sejauh ini belum bisa terwujud sepenuhnya. Pemerintah daerah akan terus berusaha dan akan menjadi bahan evaluasi kedepannya.

Keberadaan pengembangan pariwisata dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Bagi masyarakat awam pembangunan kawasan tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi kesejahteraan hidup mereka, antara lain: dirasakan oleh para keluarga nelayan yang akan dipindahkan, serta pedagang kaki lima, sayuran dan kios kecil, karena semenjak pembangunan *retail modern* menjadikan mereka mengalami kerugian secara individu namun juga memiliki hasil yang kurang mendapatkan pendapatan tetapi dapat membangun infrastruktur mereka. Dengan ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat membangun daya saing, melangkah proaktif, inovatif dan konstruktif tentunya dengan mengedepankan semangat dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat agar dapat membangun daya saing yang berkelanjutan (LSM Loteng, 2018).

Pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang telah dibangun diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ikut terlibat mengelola kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Potensi yang ada dapat dikembangkan dengan salah satu model pengembangan pariwisata adalah pariwisata berbasis masyarakat. Pola pariwisata yang bisa diterapkan ini dapat memberikan berbagai keuntungan yang beragam, selain dapat meningkatkan pendapatan berupa uang tunai juga dapat mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, bertambahnya sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha dan pemerataan pendapatan diantara masyarakat. Menurut pengertian akademis ilmu ekonomi, istilah dari pembangunan (*development*) secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional. Hal tersebut menggambarkan kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam waktu yang cukup lama untuk menciptakan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNP (*gross national product*) tahunan pada tingkat 5 persen hingga 7 persen atau bahkan lebih tinggi jika hal tersebut memungkinkan (Todaro, 2006). Berkaitan dengan hal yang ada maka diperlukan perencanaan pengembangan pariwisata mulai diarahkan menggunakan *community approach* atau *community based tourism*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung

fasilitas wisata serta pelayanannya sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi (Nurhayati, 2009).

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkembang dibutuhkanannya peran partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya peran partisipasi masyarakat perkembangan pariwisata yang ada tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Munculnya *community based tourism* dari strategi pengembangan masyarakat yaitu dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat yang ada di desa yang diharapkan dapat mengelola sumber daya pariwisata dengan partisipasi masyarakat setempat. Indikator implementasi *Community Based Tourism* yaitu dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya dan dampak lingkungan.

Modal sosial sangat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, karena dengan modal sosial, masyarakat dapat mempertahankan norma-norma serta adat istiadat yang sudah berlaku didaerahnya, sehingga pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan dan dapat mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat, harus mempertahankan norma, budaya dan adat istiadat di suatu daerah. Modal sosial berupa budaya serta adat istiadat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata yang unik, yang merupakan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung (Maramon, 2017). Menurut (Gede Ngurah, 2018) pengaruh modal sosial berpengaruh positif terhadap *community based tourism* di Kecamatan Gianyar, Sukawati dan Blahbatu hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya kualitas modal sosial di wilayah penelitian semakin bagus kualitas *community based tourism*.

Dibalik banyaknya peluang yang tersedia di kawasan ekonomi khusus Mandalika terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi kawasan ekonomi khusus Mandalika yaitu antara lain masih diperlukannya pendidikan *vocational* yang memenuhi sesuai dengan standar kebutuhan sektor pariwisata, banyak ditemukannya pekerja anak di wilayah wisata, keamanan dan juga masih kurangnya kesadaran akan menjaga kesadaran akan kebersihan sekitar pantai.

Pendekatan yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan partisipatif dibutuhkan koordinasi, kerjasama dan peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder* termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan CBT membutuhkan dukungan besar dari pemerintah dan berbagai tingkatan yang berawal dari tingkatan Desa hingga Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan CBT peran pemerintah dibutuhkan. Salah satu strategi yang dilakukan antara lain dengan memperkuat komunitas di sekitar destinasi. Peran pemerintah yaitu menjamin agar komunitas memiliki akses, kontrol, kesempatan dan juga kekuatan dalam berkembangnya pariwisata sekitar melalui regulasi yang akan dibuat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Triana Lidona, 2019) bahwa peran pemerintah berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat semakin berpengaruh baik apabila didukung dengan peran pemerintah yang baik dan berkualitas.

Dalam CBT, komunitas merupakan peran utama didalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk meningkatkan standard kehidupan masyarakat (Wihasta & Prakoso, 2012). Adanya keikutsertaan masyarakat untuk secara bersama-sama membangun dan mengelola wisata yang ada disebut pengembangan desa wisata dengan konsep *Community Based Tourism* (Rahman & Idajati, 2017). Tiga komponen pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan kepariwisataan yaitu: dunia usaha/industri, masyarakat (termasuk tokoh masyarakat/agama, pers, LSM, akademis), pemerintah (Sedarmayanti, 2014). Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator sedangkan dunia usaha/industri dan masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan pariwisata. Kepariwisataan Indonesia yang dilaksanakan dalam kompetisi tersebut bersifat multidimensi, interdisipliner, dan partisipatoris dalam suatu sistem utuh dan terpadu.

Tujuan akhir dari pembangunan pariwisata yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat lokal yang mampu membuat perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila partisipasi masyarakat lokal dapat ditingkatkan, maka akan terjadi dampak positif secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Kenyataannya partisipasi masyarakat lokal di Kabupaten Lombok Tengah masih belum dikatakan maksimal dalam berjalannya pembangunan khususnya sektor wisata, yang ada pada dasarnya mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lokal dan juga dapat menekan jumlah pengangguran yang ada untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sebagai dasar analisis maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: Peran pemerintah dan modal sosial berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat di kawasan ekonomi khusus Mandalika kabupaten Lombok Tengah, NTB. Peran pemerintah, modal sosial dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Variabel partisipasi masyarakat memediasi peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini menjadi perhatian pemerintah yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang berada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Variabel bebas (*Independent variabel*) dalam penelitian ini adalah X1 peran pemerintah, variabel X2 Modal sosial, variable X3 Partisipasi Masyarakat. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan masyarakat. Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Unit analisis penelitian industry pariwisata dalam kawasan Kuta Mandalika yang menjadi populasi dalam penelitian yaitu tokoh masyarakat, pelaku industri, pemerintah setempat yang terlibat dan akademis yang berjumlah 1.196 orang yang berada di Kabupaten Lombok Tengah (ITDC, 2019). Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* berdasarkan dengan jumlah tokoh masyarakat, pelaku industri, pemerintah setempat yang terlibat dan akademis. Jumlah sampel penelitian adalah berjumlah 300 responden yang bermukim di kawasan Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dengan toleransi kesalahan 5 persen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, koesioner, wawancara dan wawancara mendalam.

Berdasarkan konsep penelitian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). Model persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y1 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 X1X3 + \beta_5 X2X3 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

X1	= Peran pemerintah
X2	= Modal sosial
X3	= Partisipasi masyarakat
X1X3	= interaksi X1 dengan X3
X2X3	= interaksi X2 dengan X3
Y1	= Kesejahteraan masyarakat

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$ = koefisien jalur
 ε_1 = inner residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.
Outer Loading

Hubungan Kausal Indikator Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.1 <- X1	0.765	0.766	0.031	24.670	0.000
X1.2 <- X1	0.702	0.699	0.042	16.694	0.000
X1.3 <- X1	0.841	0.841	0.024	35.685	0.000
X1.4 <- X1	0.829	0.829	0.019	44.037	0.000
X2.1 <- X2	0.881	0.880	0.017	52.990	0.000
X2.2 <- X2	0.877	0.877	0.016	55.949	0.000
X2.3 <- X2	0.858	0.857	0.026	32.732	0.000
X3.1 <- X3	0.810	0.810	0.033	24.246	0.000
X3.2 <- X3	0.895	0.895	0.014	65.689	0.000
X3.3 <- X3	0.904	0.903	0.017	54.566	0.000
X3.4 <- X3	0.927	0.926	0.011	85.133	0.000
Y1.1 <- Y1	0.855	0.854	0.018	48.319	0.000
Y1.2 <- Y1	0.890	0.889	0.013	66.695	0.000
Y1.3 <- Y1	0.888	0.886	0.014	65.611	0.000

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4. terlihat semua indikator memiliki *outerloading* yang signifikan ataupun berbeda nyata. Hal ini mengkonfirmasi seperti dengan nilai validitas dari tiap indikator bahwa model pengukuran pada variabel laten ini sangat baik. Setiap variabel memiliki hubungan dengan tiap indikator dengan nilai *p-value* lebih sangat kecil atau kurang dari 0,05. Selanjutnya akan disajikan *inner model graph*. Uji *convergent validity* dapat menjelaskan korelasi antar konstruk dengan indikatornya. Korelasi konstruk dalam model ini dinyatakan valid karena nilai *loading* >0,70.

Tabel 5.
Cross Loading

Indikator	X1	X2	X3	Y1
X1.1	0.765	0.539	0.566	0.461
X1.2	0.702	0.443	0.448	0.405
X1.3	0.841	0.655	0.639	0.567
X1.4	0.829	0.686	0.708	0.614
X2.1	0.670	0.881	0.722	0.580
X2.2	0.666	0.877	0.757	0.637
X2.3	0.631	0.858	0.682	0.626
X3.1	0.557	0.647	0.810	0.620
X3.2	0.704	0.760	0.895	0.708
X3.3	0.697	0.765	0.904	0.732
X3.4	0.733	0.749	0.927	0.743
Y1.1	0.584	0.645	0.700	0.855
Y1.2	0.578	0.602	0.689	0.890
Y1.3	0.582	0.609	0.702	0.888

Sumber: Data diolah, 2022

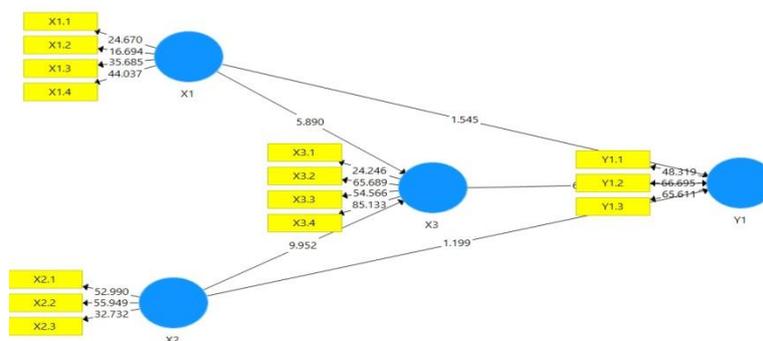
Tabel 5. nilai korelasi *cross loading* menunjukkan indikator partisipasi masyarakat memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai korelasi *cross loading* variabel laten lainnya. Indikator persentase nilai korelasi *cross loading* pengaruh partisipasi masyarakat (X_3) dengan indikator $X_{3,3}$ dan $X_{3,4}$ memiliki nilai pengaruh yang tinggi sebesar 0,904 dan 0,927 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata indikator dinyatakan *valid*.

Tabel 6.
Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE) dan Alpha Cronbach

Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Realibility	Avarage Variance Extracted (AVE)
X1	0.795	0.815	0.866	0.618
X2	0.842	0.843	0.905	0.760
X3	0.907	0.913	0.935	0.783
Y1	0.851	0.851	0.910	0.770

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 6. menyajikan bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki indeks (X_3) *composite reliability* (CR) tertinggi dengan *loading factor* 0,935 dan variabel peran pemerintah (X_1) memiliki indeks *composite reliability* terendah dengan *loading factor* 0,827. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dengan indikator reflektif memenuhi syarat *composite reliability* karena memiliki nilai lebih dari 0,7. Penyesuaian yang akurat untuk mengevaluasi validitas diskriminan dapat dilakukan dengan cara membandingkan akar AVE dari setiap konstruk dengan korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Nilai AVE yang menjadi acuan adalah lebih dari 0,5 (Ghozali, 2015) sebab nilai AVE kurang dari 0,5 mengindikasikan bahwa rata-rata banyak kesalahan tetap dalam item daripada varians yang dijelaskan oleh struktur faktor laten yang disebabkan pada pengukuran. Nilai AVE pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa konstruk pengaruh peran pemerintah (X_1) memiliki nilai AVE terendah yaitu 0,618 namun telah memenuhi kriteria AVE. Nilai *cronbach alpha* menjelaskan konsistensi pernyataan dalam instrument. Seluruh variabel dinyatakan reliabel dalam model ini yaitu memiliki nilai *loading* > 0,7. Dapat diartikan bahwa hasil analisis data telah memperlihatkan uji validitas dan reliabilitas indikator konstruk variabel pengaruh peran pemerintah (X_1), modal sosial (X_2), partisipasi masyarakat (X_3) dan kesejahteraan masyarakat (Y_1) dengan indikator reflektif telah memenuhi persyaratan validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas komposit dengan *cut value* yang berada diatas yang disarankan.



Gambar 1.
Inner Model Operasional Jalur Persamaan Struktural

Gambar 1 menunjukkan bahwa koefesien regresi antara variabel pengaruh peran pemerintah (X_1) dengan variabel modal sosial (X_3) adalah 5,890. Variabel modal sosial (X_2) dengan partisipasi

masyarakat (X_3) memiliki koefisien dengan nilai 9,952. Variabel partisipasi masyarakat (X_3) dengan kesejahteraan masyarakat (Y_1) memiliki koefisien dengan nilai 6,511.

Tabel 7.
Nilai Uji R-Square (R^2)

Variabel	R Square	Keterangan
X3	0.730	Kuat
Y1	0.642	Moderat

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 7. menunjukkan arah panah konstruk laten endogen pada partisipasi masyarakat (X_3) tergolong “kuat” dengan nilai *R-Square* 0,729 diatas nilai 0,66, kesejahteraan masyarakat (Y_1) tergolong “moderat” dengan nilai *R-Square* 0,642 dibawah nilai 0,66. Nilai *Q-Square* yang dihasilkan sebesar 0,903 memiliki arti bahwa model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen dan model persamaan struktural sebesar 90,3 persen dan sisanya 9,7 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Tabel 8.
Uji Pengaruh Langsung Variabel Laten

Hubungan Kausal Variabel Laten	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> X3	0.327	0.325	0.055	5.890	0.000
X1 -> Y1	0.100	0.104	0.065	1.545	0.123
X2 -> X3	0.581	0.583	0.058	9.952	0.000
X2 -> Y1	0.114	0.123	0.095	1.199	0.231
X3 -> Y1	0.624	0.612	0.096	6.511	0.000

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai beta sebesar 0,327 dan nilai *t-statistic* sebesar 5,890 dengan nilai *p-values* sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (X_3). Nilai beta sebesar 0,100 dan nilai *t-statistics* sebesar 1,545 dengan nilai *p-values* sebesar 0,123 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah (X_1) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1). Nilai beta sebesar 0,581 dan nilai *t-statistics* sebesar 9,952 dengan nilai *p-values* sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (X_3). Nilai beta sebesar 0,114 dan nilai *t-statistics* sebesar 1,199 dengan nilai *p-values* sebesar 0,231 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial (X_2) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1). Nilai beta sebesar 0,624 dan nilai *t-statistics* sebesar 6,511 dengan nilai *p-values* sebesar 0,000 < 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1).

Tabel 9.
Uji Pengaruh Tidak Langsung Variabel Laten

Hubungan Kausal	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X2 -> X3 -> Y1	0.363	0.355	0.057	6.380	0.000
X1 -> X3 -> Y1	0.204	0.200	0.053	3.857	0.000

Sumber: Data diolah, 2022

Diperoleh hasil koefesien sebesar 0,000 dengan *t-statistics* 6,380 dan *p-values* 0,000. Atas dasar penggunaan taraf signifikansi (*level of significant*) $\alpha = 5$ persen, diketahui *t-statistics* lebih kecil dari *t*-tabel kritis 1,96. Dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat sepenuhnya dapat memediasi pengaruh peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Diperoleh hasil koefesien sebesar 0,000 dengan *t-statistic* 3,857 dan *p-values* 0,000. Atas dasar penggunaan taraf signifikan (*level of significant*) $\alpha = 5$ persen, diketahui *t-statistic* lebih kecil dari *t*-tabel kritis 1.96 dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat sepenuhnya dapat memediasi pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa peran pemerintah dan modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat semakin berpengaruh baik apabila didukung oleh peran pemerintah dan modal sosial yang baik dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan kajian teori dan empiris pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap partisipasi masyarakat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai program yang dapat dibuat salah satu program yang dapat dijalankan yaitu program desa wisata. Pengembangan desa wisata sebagai program pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk memberikan upaya sebagai salah satu penanggulangan kemiskinan disuatu daerah denan mengelola potensi lokal yang ada didaerah tersebut. Dengan melalui desa wisata masyarakat diuntungkan melalui banyaknya wisatawan yang datang berkunjung. Adanya program desa wisata akan memberikan banyaknya manfaat yang berguna untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berada di dalamnya.

Hasil wawancara mendalam dengan Bapak LMH di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, mengutarakan:

“Bahwa kebijakan pemerintah dari sisi stimulasi untuk mendukung pariwisata adalah dengan memberikan beberapa pelatihan yang juga bekerjasama dan bersinergi denan POLTEKPAR Lombok untuk memberikan beberapa pelatihan dalam bidang pariwisata”.

Untuk mendapatkan pelatihan ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program-program kerja yang sudah tersusun dan merealisasikannya kepada masyarakat sesuai dengan *time table* yang telah dirancang kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat membuat dan menjalankan sesuai dengan yang telah diajarkan. Pengembangan sektor pariwisata adalah suatu tindakan yang realistis dan logis yang dimana memiliki dampak positif yang dapat ditimbulkan diantaranya

dengan semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, *took souvenir* atau oleh-oleh serta meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun disamping itu terdapat juga beberapa hal yang dapat berdampak *negative*.

Penelitian yang dilakukan Nurdalwah (2020) yakni daerah Kabupaten Pangkep sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki obyek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengembangan pariwisata namun dengan berbagai keterbatasan maka pengembangan pariwisatanya berjalan kurang baik. Selain memiliki obyek wisata pantai ada terdapat obyek-obyek wisata lainnya dan untuk saat ini pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep secara bertahap berusaha untuk dapat membenahi dan memberikan berbagai sarana dan prasarana penunjang agar dapat menambah jumlah wisatawan yang ingin berkunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Kawasan wisata di Kabupaten Pangkep dianggap memiliki potensi yang baik. Potensi wisata yang ada di Kabupaten Pangkep sangat memiliki daya tarik tinggi, karena menjadi obyek wisata yang sangat diminati. Pariwisata berbasis masyarakat mendapatkan perhatian dari dunia dengan adanya *Community Based Tourism* (CBT) kawasan pengembangan wisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan meskipun diperlukannya pelatihan dalam pengenalan produk wisata kepada masyarakat dari pemerintah maupun lembaga swasta untuk memenuhi tujuan bersama (Guzman *et al*, 2011).

Modal sosial merupakan dasar dari kearifan lokal yang ada sehingga pentingnya modal sosial karena merupakan suatu yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, terutama dalam pengembangan potensi pariwisata yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, diperlukannya adanya ketentuan yang jelas harus dirumuskan melalui forum-forum masyarakat untuk memperoleh kesepakatan mengenai ketentuan dan peraturan yang disepakati. Pendapat dari responden LWP mengatakan:

“Masyarakat juga bisa menjadi alat marketing yang baik jika ingin wisata di daerahnya lebih dikenal. Sehingga tidak dipungkiri akan meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar lokasi wisata serta menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pelaku dalam pengembangan kepariwisataan”.

Hal ini sesuai dengan modal sosial dalam bentuk *networking* mempengaruhi pembangunan berkelanjutan Baksh, *et.al.* (2001). Dukungan pemerintah dan modal sosial menjadi bagian penting untuk membuat masyarakat melakukan partisipasi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa peran pemerintah dan modal sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat perbedaan dari hasil hipotesis partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak tercapai dengan sendirinya jika didalam partisipasi masyarakat tidak melibatkan peran pemerintah dan modal sosial.

Partisipasi masyarakat, peran pemerintah dan modal sosial untuk pengembangan masyarakat sulit untuk diabaikan di daerah pedesaan yang memiliki sistem kemasyarakatan yang erat. Konsep pariwisata berbasis masyarakat telah menjadi yang terdepan dalam promosi pembangunan pedesaan baik di negara maju maupun berkembang (Honey, 2008). Pariwisata berbasis komunitas harus menghormati budaya lokal dan menemukan cara untuk meningkatkan dan menyelamatkan budaya dan warisan lokal (Telfer dan Sharpley, 2008). Menurut Warner (2001) modal sosial menjadi kontribusi yang kuat terhadap partisipasi masyarakat apabila didukung dengan adanya peran pemerintah untuk dapat meningkatkan tujuan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa dapat partisipasi masyarakat memediasi pengaruh peran pemerintah dan modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dalam

kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Partisipasi masyarakat dapat didukung dengan baik dengan adanya peran pemerintah dan modal sosial maka akan berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Dinamika pariwisata diatas, tingkat partisipasi lokal menggunakan beberapa level partisipasi menurut Arnstein (1971) yang terdiri atas derajat kuasa/kekuatan masyarakat (*degree of citizen power*), Partisipasi semu (*tokenism*) dan tidak partisipatif (*non participation*). Saat ini masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah termasuk level partisipasi semu (*tokenism*). Hasil wawancara mendalam dengan beberapa masyarakat mengatakan:

“Masyarakat berpartisipasi secara pasif pada awal pengembangan KEK Mandalika dikarenakan masih minimnya informasi dan pemahaman terkait dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan”. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dinilai pasif karena masyarakat mengikuti apa yang telah ditetapkan. Sehingga diminta menjaga kualitas daerahnya untuk menunjang kegiatan wisata. Masyarakat berpartisipasi secara tidak langsung pada tahap perencanaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengambil langkah-langkah pada tahap pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Setelah melakukan wawancara bahwa kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika terdapat permasalahan terkait pembebasan lahan, penempatan pedagang lapak di lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

Langkah pertama yang diambil untuk mengatasi hal tersebut maka para pedagang lapak dengan terpaksa menempati lapak yang disediakan oleh pihak ITDC. Dengan demikian masyarakat diarahkan pada pilihan alternatif untuk mengatasi suatu permasalahan yang nantinya akan mendapatkan *feedback* dari pilihan alternative tersebut. Masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan harga jual barang yang dijual pada perencanaan. Berdasarkan fenomena yang ada, masyarakat sekaligus pelaku industri penting terlibat dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pihak pemerintah maupun swasta harus mensosialisasikan tentang keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kepada masyarakat serta pelaku industri yang ada di Kabupaten Lombok Tengah bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan membawa hal positif untuk kesejahteraan masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dapat disimpulkan adanya kemauan dari responden secara keseluruhan ikut berpartisipasi didalam pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang dibuktikan dengan adanya ikut serta dalam pelatihan yang dilakukan pemerintah dan memberikan masukan terkait dengan pariwisata dan juga terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Peran aktif masyarakat tersebut mampu mempertahankan aspek lingkungan dengan menjaga kelestarian objek wisata, aspek sosial budaya dengan mempertahankan budaya asli daerah yang diminati wisatawan serta aspek ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.

Salah satu ideologi dasar utama dari pariwisata yang berpihak pada rakyat miskin jelas menyatakan bahwa masyarakat lokal harus berkontribusi dalam keputusan pariwisata jika signifikansi mata pencaharian mereka dicerminkan dalam cara pariwisata dikembangkan (Chok dan Macbeth, 2007). Tosun (2006) dalam studinya percaya bahwa dengan memiliki pendekatan partisipatif akan memungkinkan penggunaan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dengan menghasilkan peluang yang ditingkatkan dari penduduk lokal untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih seimbang dari pariwisata yang terjadi di daerah mereka, selanjutnya akan mengarah pada sikap positif dalam melestarikan sumber daya dan alam lokal setempat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah (X_1) dan Modal sosial (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat (X_3) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Modal sosial yang semakin tinggi pengaruhnya maka pembangunan pariwisata berkelanjutan juga semakin baik sehingga partisipasi masyarakat akan menunjang peningkatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1) namun terdapat perbedaan dari hasil peran pemerintah (X_1) dan modal sosial (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1) berpengaruh tidak signifikan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Partisipasi Masyarakat (X_3) memediasi peran pemerintah (X_1) dan modal sosial (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_1) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Namun kenyataan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa adanya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan kepada pemerintah bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berbasis partisipasi masyarakat adalah solusi bagi pengembangan wilayah pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan dasar didalam pengembangan destinasi wisata yang tersedia. Partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan pariwisata harus lebih ditingkatkan dengan cara penguatan organisasi dalam bidang kepariwisataan, dengan cara membentuk kelompok kuliner dan cinderamata yang merupakan sumber dari mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Sanggar seni juga harus dikembangkan oleh pemerintah agar masyarakat tetap menjaga budaya serta adat istiadat didalam proses pembangunan pariwisata yang akan terus berkembang. Peran swasta diharapkan harus lebih ditingkatkan, dan dipertegas dengan peraturan daerah yang mengatur peran sektor swasta didalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

REFERENSI

- Amerta, I Made Suniastha. 2017. Community Based Tourism Development. International Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 1 (2). Hal: 97-107
- Andriani, Dini dan I Gd Pitana. 2011. Ekowisata: Teori, Aplikasi dan Implikasi. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Vol 6 (2). Hal: 1-16
- Arta, Ketut Sedana. (2012). *Kolaborasi Masyarakat Sipil, Politik dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Modal Sosial. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 117–128.
- Barbosa, Luiz Gustavo Medeiros, Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira, and Cristiane Rezende. 2010. Competitiveness of Tourist Destinations: The Study of 65 Key Destinations for the Development of Regional Tourism. *Revista de Administração Pública*, Vol. 44, (No.5) : 1067–95.
- Blackstock, Kirsty. 2005. A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, Vol. 40, issue 1, pages 39-49.
- Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2014). *Business Reseach Methods*. TwelfthEdition New York. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Demartoto, A. (2009). *Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Evans, N., Campbell, D., Stonehouse, G. (2013). *Strategic Management for travel and Tourism*: Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Fitriani, E. (2018). *Strategi Pengembangan Taman Wisata Kum Kum Sebagai Wisata Edukasi Di Kota Palangkaraya*. Jurnal Pendidikan Geografi. Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Tahun 23, Nomor 2, Jun 2018 Halaman: 94-106
- Guzman, Tomas Lopez, *et al* (2011). Community Based Tourism In Developing Countries: A case study. *Journal of tourism* vol. 6. No. 1. pages: 69-84.

- Hidayat, M. (2011). *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata*. Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal, Vol. I, No. 1, 2011 – 35.
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development Who Owns Paradise?* Washington D.C.
- Jamal T, Stronza. (2009). Collaboration Theory And Tourism Practice In Protected Areas: Stakeholders, Structuring And Sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*. Vol. 17, Hal. 169-189.
- Jugmohan, Sean & Andrea Giampiccoli. 2017. Community-based Tourism Development: A Possible Educational Gap. *Jornal Anthropologist*. Vol 30 (1). Hal: 52-60
- Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan-Bali. E-*Jurnal EP Unud*, No. 4, Hal. 1219-1246.
- Makkasau, N (2020), Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Cambang-cambang Kabupaten Pangkep, Vol 3, No 3, Hal. 167-174.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati. (2005). *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Rineka. Jakarta.
- Nurhidayati, Sri Endah. (2012) Community based tourism sebagai pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Surabaya: Unair.
- Nuryanti, W. (2009). *Tourism: Concept, perspective and challenges* (Makalah pada konferensi internasional tentang pariwisata budaya Yogyakarta). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parwata, I Putu. 2014. Peran Pemerintah Terhadap Modal Sosial dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan di Badung Utara. Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Prabawati, H. J. K. (2013). *Faktor-Faktor keberhasilan community based tourism dalam pengembangan desa wisata (studi kasus: PNPM mandiri pariwisata di dataran tinggi Dieng)*. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pitana, I Gde dan Diarta. I ketut Surya. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purbadharmaja, Ida Bagus, Made Sukarsa, Ida Gusti Bagus Indrajaya, Wayan Yogiswara, dan Putu Desy Apriliani. (2014). Profil Penduduk Miskin Di Desa–Desa Pesisir Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 19, No. 1.
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1), 1–13.
- Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. S2 Kajian Pariwisata. Bali: Universitas Udayana.
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta; Gava Media.
- Rahman, C. N. A., & Idajati, H. (2017). Karakteristik Kawasan Wisata di Desa Ngunut Kabupaten Bojonegoro dengan Konsep Community Based Tourism. *Jurnal Teknik ITS*, 6(1), 71–74.
- Ridwan, M. (2012). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Medan: PT SOFMEDIA.
- Ringa, Maria Bernadetha. 2019. Peran Pemerintah, Sektor Pariwisata dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Rizkianto, Neno, dan Topowijono. 2018. Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan (Studi Pada Desa Wisata Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol 58 (2). Hal: 20-26
- Setyaningsih, Wiwik. (2010) Community based tourism. Surakarta: Unsprs.
- Simamora, H. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Simpson, M. C. (2008). Community Benefit Tourism Initiatives - A conceptual oxymoron? *Tourism Management*, 29 (1), 1–18.
- Subanti, S. (2011) *Analisis Permintaan Di Kabupaten Semarang (Studi Empiris Di Obyek Wisata Alam Dan Sejarah)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- UNESCO (2009). Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata. Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Warner, Mildred. 2001. Building social capital: the role of local government. *Journal of socio.economics* 30. Pages: 187-192
- Widodo, Singgih. (2013). *Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Persepsi Wisatawan*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Wihasta, C. R., & Prakoso, E. H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Bumi Indonesia*, 1(1), 1–9.